



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. MALANG



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

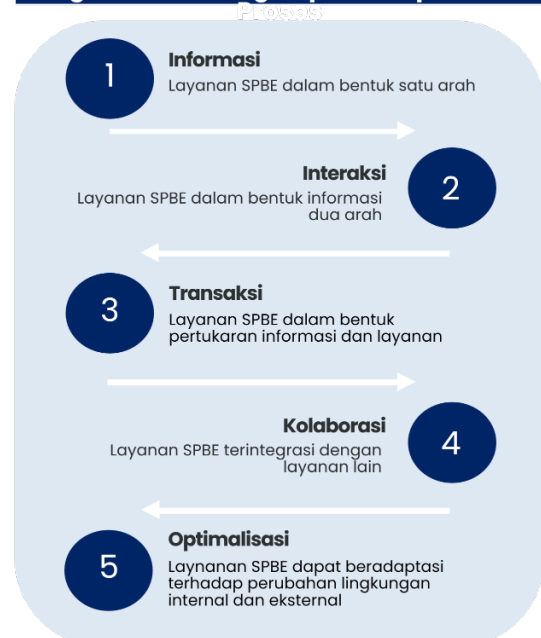
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



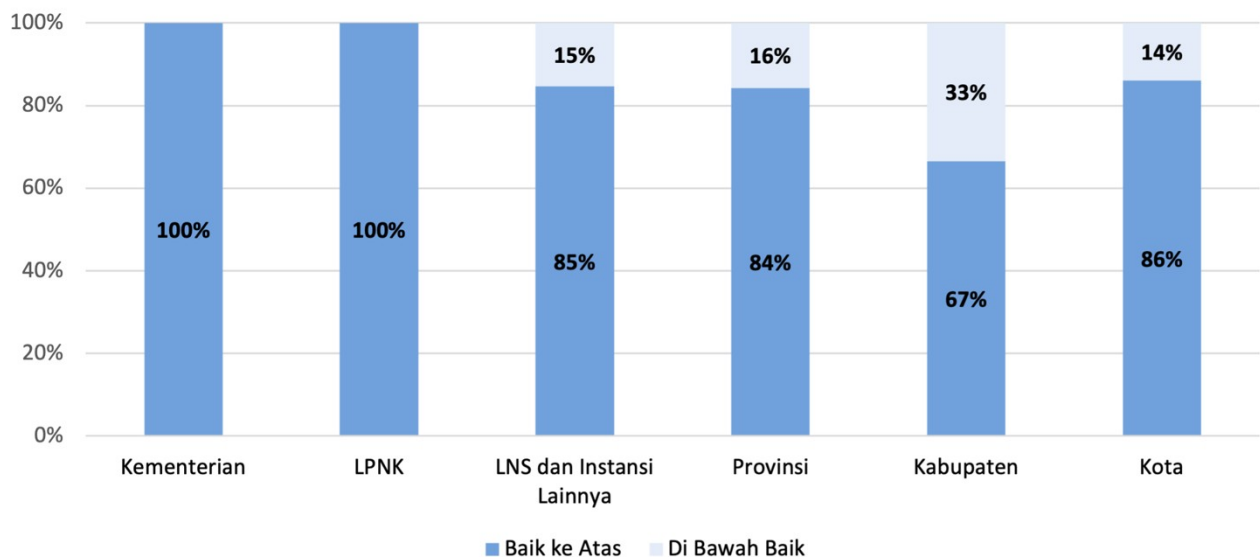
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

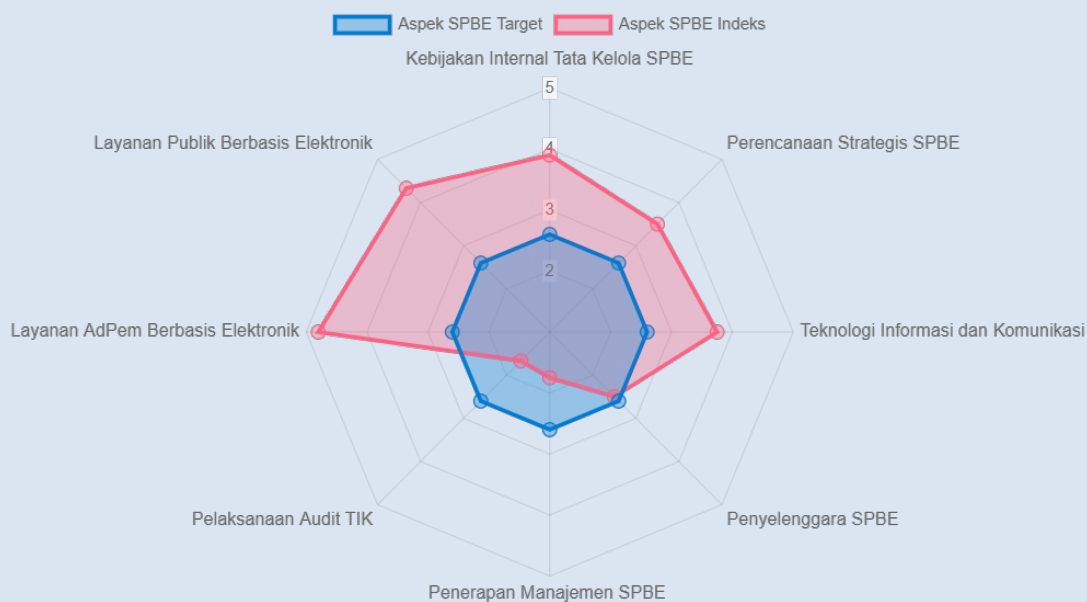
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,74
Domain Kebijakan SPBE	3,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	3,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,75
<i>Audit TIK</i>	1,67
Domain Layanan SPBE	4,62
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara umum, capaian untuk aspek ini masuk dalam kategori SANGAT BAIK. Mayoritas indikator telah sampai pada tahap review, namun untuk Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, belum sampai pada tahap review kebijakan

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, keunggulan pada indikator Kebijakan Internal Manajemen Data, telah dilakukan review pada kebijakan ini, dan ada tindak lanjut dengan kebijakan baru. Selain itu keunggulan pada Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan internal ini telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Sementara itu, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE, telah memenuhi ruang lingkup kebijakan.

- Kelemahan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, tidak ada kelemahan di aspek ini.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara umum, capaian untuk aspek ini masuk dalam kategori SANGAT BAIK. Secara umum, indikator2 dalam aspek ini sudah sampai pada tahap review, namun untuk Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dan novasi Proses Bisnis SPBE belum sampai pada tahap review

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, kekuatan ada pada indikator Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, semuanya telah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

- Kelemahan

Untuk aspek Perencanaan Strategis SPBE, tidak ada kelemahan di aspek ini.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara umum, aspek ini telah memenuhi kategori SANGAT BAIK, mayoritas telah sampai pada tahap review. Namun untuk indikator Pembangunan Aplikasi SPBE belum sampai pada tahap review

- Kekuatan

Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, kekuatan ada pada Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Penerapan dari beberapa indikator ini sudah dilaksanakan dan telah direviu secara periodik

- Kelemahan

Untuk aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, tidak ada kelemahan dalam aspek ini

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, aspek ini masuk dalam kategori BAIK. Masih banyak room of improvement. Kolaborasi Penerapan SPBE masih belum sapaai pada tahap review, dan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE belum dilaksanakan sepenuhnya

- Kekuatan

Pada Aspek Aspek Penyelenggara SPBE ini, semua indikator masih perlu banyak peningkatan (tidak ada yang menunjukkan kekuatan)

- Kelemahan

Untuk aspek Penyelenggara SPBE, Kelemahan pada Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, belum ada bukti bahwa program kerja tim Koordinasi SPBE telah dilaksanakan seluruhnya

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, capaian aspek ini masuk dalam kategori KURANG. Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan. masih banyak room of improvement yang bisa dilakukan. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan. Belum ada

bukti pelaksanaan/penerapan dari setiap indikator ini. Sementara itu, untuk indikator Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, belum ada bukti pelaksanaan

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini, semua indikator masih perlu ditingkatkan (tidak ada yang menunjukkan kekuatan)
- Kelemahan
Untuk aspek Penerapan Manajemen SPBE, kelemahan ada pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan. Indikator2 ini telah didukung oleh peta rencana, namun belum ada bukti pelaksanaan/penerapan dari setiap indikator ini. Sementara itu, untuk indikator Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, belum ada bukti pelaksanaan dan tidak didukung oleh adanya peta rencana.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, capaian aspek pelaksanaan audit TIK masuk dalam kategori KURANG. Masih banyak perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan. Belum dilakukan audit eksternal untuk Audit Aplikasi SPBE. Sementara itu Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE belum terlaksana

- Kekuatan
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, belum ada indikator yang menjadi kekuatan
- Kelemahan
Untuk aspek Audit TIK, indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE merupakan kelemahan. Hal ini karena belum dilaksanakannya audit terkait.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara umum, capaian aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah menunjukkan indeks kategori MEMUASKAN. Mayoritas indikator telah sampai pada tahap review dan tindak lanjut, kecuali Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah. Kedua indikator ini belum sampai pada langkah tindak lanjut

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, kekuatan terdapat pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai. Untuk layanan ini, Pemda menggunakan aplikasi umum, telah dilakukan review. Tindak lanjut untuk hasil review dari aplikasi umum ini berupa usulan perbaikan ke pihak pengembang aplikasi. Sementara itu, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Layanan Pengawasan Internal, Pemda telah menggunakan aplikasi umum atau berbagai pakai, dan sudah dimanfaatkan secara komprehensif.
- Kelemahan
Untuk aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, tidak ada kelemahan dalam aspek ini.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara umum, capaian aspek ini sudah masuk pada kategori MEMUASKAN. Mayoritas sudah sampai pada tahap review dan tindak lanjut, kecuali pada Layanan Data Terbuka. Sedangkan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan titik lemah, karena pemenuhan masih pada layanan informasi dan interaksi, belum sampai pada layanan transaksi dan kolaborasi.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini, kekuatan terdapat pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dimana pemda telah menggunakan aplikasi umum, dan telah direview, serta usulan perbaikan hasil review telah dikirim ke pihak pengembang aplikasi. Layanan Publik Sektor merupakan kekuatan dari Pemda. Aplikasi untuk layanan ini mendukung RB Tematik. Layanan Data Terbuka juga merupakan kekuatan, karena telah digunakannya aplikasi umum.
- Kelemahan
Untuk aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, kelemahan terdapat pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), karena pemenuhan masih pada layanan informasi dan interaksi, belum sampai pada layanan transaksi dan kolaborasi.

REKOMENDASI

RINGKASAN

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata telola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Secara umum, Capaian semua aspek dari PemKab Malang masuk dalam predikat SANGAT BAIK. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik, telah mencapai indeks sangat memuaskan, karena sudah banyak digunakan aplikasi umum, dan sebagian sudah direview dan dikirimkan usulan perbaikan ke pihak pengembang aplikasi umum. Sementara itu aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, secara umum telah sampai pada tahap review.

Sedangkan Aspek Penyelenggara SPBE masuk kategori cukup, Penerapan Manajemen SPBE? dan Pelaksanaan Audit TIK masuk dalam kategori kurang.

KEUNGGULAN

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, keunggulan pada indikator Kebijakan Internal Manajemen Data, telah dilakukan review pada kebijakan ini, dan ada tindak lanjut dengan kebijakan baru. Selain itu keunggulan pada Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan internal ini telah direviu dan dievaluasi secara periodik. Sementara itu, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE, telah memenuhi ruang lingkup kebijakan.

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, kekuatan ada pada indikator Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, semuanya telah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, kekuatan ada pada Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Penerapan dari beberapa indikator ini sudah dilaksanakan dan telah direview secara periodik

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, kekuatan terdapat pada Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai. Untuk layanan ini, Pemda menggunakan aplikasi umum, telah dilakukan review. Tindak lanjut untuk hasil review dari aplikasi umum ini berupa usulan perbaikan ke pihak pengembang aplikasi. Sementara itu, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Layanan Pengawasan Internal, Pemda telah menggunakan aplikasi umum atau berbagai pakai, dan sudah dimanfaatkan secara komprehensif.

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini, kekuatan terdapat pada Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dimana pemda telah menggunakan aplikasi umum, dan telah direview, serta usulan perbaikan hasil review telah dikirim ke pihak pengembang aplikasi. Layanan Publik Sektor merupakan kekuatan dari Pemda. Aplikasi untuk layanan ini mendukung RB Tematik. Layanan Data Terbuka juga merupakan kekuatan, karena telah digunakannya aplikasi umum.

KELEMAHAN

Untuk aspek Penyelenggara SPBE, Kelemahan pada Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, dimana belum ada bukti bahwa program kerja tim Koordinasi SPBE telah dilaksanakan seluruhnya

Untuk aspek Penerapan Manajemen SPBE, kelemahan ada pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan. Indikator2 ini telah didukung oleh peta rencana, namun belum ada bukti pelaksanaan/penerapan dari setiap indikator ini. Sementara itu, untuk indikator Penerapan Manajemen

Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, belum ada bukti pelaksanaan dan tidak didukung oleh adanya peta rencana.

Untuk aspek Audit TIK, indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE merupakan kelemahan. Hal ini karena belum dilaksanakannya audit terkait.

Untuk aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, kelemahan terdapat pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), karena pemenuhan masih pada layanan informasi dan interaksi, belum sampai [ada layanan transaksi dan kolaborasi.

SARAN

Jika dilihat dari capaian masing-masing aspek, hanya terdapat 4 aspek yang memiliki titik lemah. Untuk aspek Penyelenggara SPBE, ke depan, sebaiknya dapat didokumentasikan bukti pelaksanaan program kerja dengan lebih baik, jika memang sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil assessment kali ini, belum ada bukti pelaksanaan program kerja tim Koordinasi SPBE. Demikian juga pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, belum terlihat adanya bukti pelaksanaan dari mayoritas indikator dalam aspek ini. Adanya dokumen peta rencana yang menyeluruh, tentu dapat mendukung pelaksanaan program-program ini dengan lebih terarah dan terencana. Untuk aspek Audit TIK, ke depan perlu dilakukan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE merupakan kelemahan, baik internal maupun eksternal

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024